

ABSTRACT

The purpose of this research was to know how good governance values implemented in village fund management process in Mojorejo, Kedungadem, Bojonegoro. It started from planning, implementation, administration, reporting, and responsibility. In addition, this research also aimed to determine reason in each action made by the village government.

This research used qualitative method with interpretive approach and etnomethodology analysis method. Data collection methods used were observation, semi-structured interview, and documentation.

The conclusion of this research; as they (1) Musrenbangdes (village-level community consultations on development planning) and preparation of APBDesa (village government budget) implemented as the first step in the disbursement of Village Fund, (2) The budgeting of village government was dependent on the assistance of subdistrict, (3) Budget plan devised by another party, (4) Village fund used properly for infrastructure development, (5) The village government was in debt when village fund was late, (6) Village treasurer was dependent in managing village administration, and (7) The report made was open report.

keywords: Village Fund, The Village Government , Etnomethodology

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana nilai pemerintahan yang baik dijalankan dalam proses pengelolaan Dana Desa di desa Mojorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan dibalik setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan interpretif dan menggunakan metode analisis etnometodologi. Serta metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Musrenbangdes dan penyusunan APBDesa yang sungguh-sungguh dilaksanakan sebagai langkah awal dalam pencairan Dana Desa; (2) penganggaran yang dilakukan Pemerintah Desa masih tergantung dengan bantuan orang kecamatan; (3) Rencana Anggaran Biaya yang dibuatkan oleh pihak lain; (4) Dana Desa digunakan sebagai mestinya untuk pembangunan infrastruktur; (5) ketika Dana Desa mengalami telat, tindakan Pemerintah Desa untuk berhutang menjadi pilihan; (6) Bendahara desa yang belum mampu mandiri dalam penatausahaannya; dan (7) laporan yang dibuat sudah terbuka.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemerintah Desa, Etnometodologi.